



2025

RENCANA KERJA (RENJA)



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA MADIUN**

☎ (0351) 471151 / 496541

📍 Gedung Graha Krida Praja Lt. 1
D.I. Panjaitan No. 17, Kota Madiun

🌐 <http://www.madiunkota.go.id>





**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA MADIUN**

NOMOR : 050 / 338/ 401.110 / 2024

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kota/Kabupaten ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Walikota Madiun Nomor : 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja dan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.021/335/2021 tentang Rincian Subkoordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

21. Peraturan Walikota Madiun Nomor : 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
22. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN TAHUN 2025**
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Sub Koordinator agar menjadikan Perubahan Renja ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk Tahun 2025.
- KETIGA** : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal, 19 Agustus 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN



MARTO NEGAH, S.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19771012200604109

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	i
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	56
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	58
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	58
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	60
3.3. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan.....	60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	80
BAB V PENUTUP	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Kota Madiun	7
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun	28
Tabel 3	Faktor Penghambat dan Pendorong Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun	30
Tabel 4	Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	33
Tabel 5	Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan	34
Tabel 6	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Madiun	36
Tabel 7	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan	56
Tabel 8	Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024.....	59
Tabel 9	Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024	59
Tabel 10	Program dan Kegiatan Mendukung Pencapaian Target Kota Madiun.....	61
Tabel 11	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Serta Prakiraan Maju Tahun 2025	65
Tabel 12	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.....	80
Tabel 13	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pohon Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun	35
----------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan dokumen perencanaan yang dibuat setiap tahun sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan atau biasa disebut Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, penyusunan Renja ini tidak lepas dari peran stakeholder serta pemangku kepentingan dalam penyusunan serta beberapa tahapan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16 ayat 2 yang dimulai dari tahapan :

- a. persiapan penyusunan.
- b. penyusunan rancangan awal.
 - penyusunan dilakukan paling lambat minggu pertama bulan desember (n-2) dengan berpedoman pada Renstra PD dan Hasil Evaluasi Renja PD tahun lalu.
 - penyempurnaan rancangan awal berpedoman pada Surat Edaran Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah.
- c. penyusunan rancangan.
- d. pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah;
 - dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah Surat Edaran Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.
- e. perumusan rancangan akhir. dan
- f. penetapan
 - ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan merupakan potret dari Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah yang telah disampaikan melalui berbagai tahapan dan telah dirumuskan untuk mendukung kebijakan kepala daerah, menampung usulan masyarakat dan stakeholder, selain itu Renja Perangkat Daerah yang disusun juga telah mengkomodir dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga sebagai bagian dari kewenangan serta tugas dan tupoksi Perangkat Daerah dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah secara normatif memuat dasar hukum sesuai dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian/ Lembaga terkait:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
 - q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
 - r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
 - s. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025
 - t. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah
 - u. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020
 - v. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
 - w. Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 tahun 2021
 - x. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023
 - y. Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 - z. Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024
 - aa. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023;
 - ab. Peraturan Walikota Madiun Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Memberikan gambaran kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024;
2. Memberikan gambaran rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2025;
3. Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan serta tolok ukur dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah

1. sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Perangkat Daerah yang mengedepankan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan pembangunan.
2. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai usulan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai berikut :

Penetapan Renja Oleh Kepala Perangkat Daerah

Daftar Isi

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dilakukan untuk memperoleh gambaran sejauh mana keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam mencapai tujuan organisasi, selain itu mengidentifikasi faktor penghambat dan mencari solusi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Evaluasi Pelaksanaan renja tahun lalu memberikan gambaran atau potret kinerja serta keselarasan dalam mencapai target kinerja perencanaan strategis.

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Kota Madiun

Kode	Ursan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode (2024)	Realisasi Target Kinerja (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2023)			Target Renja (n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)				
					Target Renja Perangkat daerah (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%) (2023)		Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan (n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Skor A	24,41%	Skor A	Skor BB			Rp 14.829.034.007		
				Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.94 Indeks				3.94 Indeks	4.20 Indeks			
1	3	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase pemenuhan dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%	Rp 310.589.784

1	3	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	2 paket					2 unit					Rp 830.307.838
1	3	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		60 paket	20 buah	20 buah	100%							
1	3	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit						5 unit					Rp 196.617.360
1	3	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%				Rp 4.563.459.395
1	3	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	10 jenis	40 laporan	40 laporan	100%		12 laporan					Rp 4.563.459.395
1	3	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%				Rp 1.224.284.000

					Pemerintahan Daerah	layak digunakan											
1	3	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	54 unit	54 buah	54 unit	54 unit	100%	54 unit					Rp 512.624.000
1	3	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	-	-	-	-	1 unit					Rp 711.660.000
1	3	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 gedung	1 unit	1 unit	100%						
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rawan Banjir/Genangan	17,34%	19.09%	100%	100%	100%	17,34%	136,43%	7,87%			Rp 12.580.676.000
1	3	2	02.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase rawan banjir/Genangan	17,34%	19.09%	100%	100%	100%	17,34%	136,43%	7,87%			Rp 12.580.676.000

					Kabupaten/Kota												
1	3	2	02.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	1 unit	2 pintu air	4 unit	4 unit	100%	1 unit					Rp 463.562.000
1	3	2	02.01	85	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%	1 unit					Rp 1.390.980.000
1	3	2	02.01	93	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.55 km	1.5 km	6 Km	5 Km	83%	1.55 Km					Rp 7.600.334.000
1	3	2	02.01	98	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	3 Unit					3 Unit					Rp 3.125.800.000
					Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhab	2 Unit	1 stasiun	4 unit	2 unit	50%						
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%			Rp 1.905.323.500

1	3	3	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%	Rp 1.905.323.500
1	3	3	02.01	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	1 dokumen			Rp 786.635.000
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota										
1	3	3	02.01	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah Yang Terlayani Oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	273 SR					273 SR			Rp 1.118.688.500
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.12%	80.06%	95%	95%	100%	80.12%	255.18%	3.18%	Rp 12.352.748.400

1	3	6	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.12%	80.06%	95%	95%	100%	80.12%	255.18%	3.18%	Rp 12.352.748.400
1	3	6	02.01	29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	18 Sistem Drainase Perkotaan	1.5 km				18 Sistem Drainase Perkotaan			Rp 443.117.000
1	3	6	02.01	30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	12 dokumen	8 dokumen	32 dokumen	15 dokumen	47%	12 dokumen			Rp 937.950.000
1	3	6	02.01	31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Yang Beroperasi dan Terpelihara	12 Sistem Drainase Perkotaan	3 kecamatan	16 m	16 m	100%	12 Sistem Drainase Perkotaan			Rp 2.971.681.400
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%	Rp 23.584.359.814

1	3	8	02.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%	Rp 23.584.359.814
1	3	8	02.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		50 pemohon	200 dokumen	140 dokumen	70%				
1	3	8	02.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		10 gedung	16 gedung	16 gedung	100%				

1	3	8	02.01	18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	8 bangunan gedung						8 bangunan gedung			Rp 352.000.000
1	3	8	02.01	21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen						2 dokumen			Rp 22.927.318.500
1	3	8	02.01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim	10 dokumen						10 dokumen			Rp 305.041.314

					(TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG											
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	80,12%	100%	100%	100%	100%	80,12%	280,12%	4,50%			Rp 22.045.832.500
1	3	9	02.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan Rawan Banjir/Genangan	80,12%	100%	100%	100%	100%	80,12%	280,12%	4,50%			Rp 22.045.832.500
1	3	9	02.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan		3 kecamatan	108 kawasan	68 kawasan	63%						

						Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									
1	3	9	02.01	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									
1	3	9	02.01	8	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	27 kawasan					27 kawasan			Rp 22.045.832.500
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan	95,70%	96%	96%	95%	99%	95,70%	286,70%	2,99%	Rp 38.554.253.532

						dalam kondisi mantab									
1	3	10	02.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kotaka	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	95,70%	96%	96%	95%	99%	95,70%	286,70%	2,99%	Rp 38.554.253.532
1	3	10	02.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	500 M ²	-	1000 M ²	1000 M ²	100%				
1	3	10	02.01	29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	10 dokumen	10 dokumen	40 dokumen	22 dokumen	55%	10 dokumen			Rp 502.840.232
1	3	10	02.01	32	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 Km	200 meter	7 Km	7 Km	100%	2 Km			Rp 1.638.050.000
1	3	10	02.01	34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	17Km	6 km	12 Km	12 Km	100%	17 Km			Rp 17.236.476.200
1	3	10	02.01	38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Dipelihara Secara Rutin	120 m	10 jembatan	240 M ²	240 M ²	100%	120 m			Rp 279.150.000

1	3	10	02.01	40	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	28 m	2 jembatan	56 M ²	56 M ²	100%	2 jembatan			Rp 10.207.932.600
					Pelebaran Jalan Menuju Standar		2 Km	-	-	-	-				
1	3	10	02.01	41	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan Yang Dilebarkan Menambah Lajur	2 Km	1 ruas	4 Km	4 Km	100%	2 Km			Rp 3.005.795.000
1	3	10	02.01	43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2 dokumen	2 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	15 Km			Rp 406.100.000
1	3	10	02.01	46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara Secara Rutin	17 Km	28 ruas	34 Km	30 Km	88%	17 Km			Rp 5.277.909.500
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	100%	95,00%	95.5%	95,50%	100%	100%	290,5%	2,90%	Rp 1.251.039.058
1	3	11	02.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pelaku Jasa Kontruksi yang Memenuhi Standart Kompetensi	94,95%	70 orang	700 orang	700 orang	100%	95%			Rp 380.352.058
1	3	11	02.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan		70 orang	700 orang	175 orang	25%				

1	3	1	02.0 1	1 6	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	200 orang						200 orang			Rp 380.352.058
1	3	1	02. 03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	-	95%	95%	95%	100%		190%	200%		-
1	3	1	02.0 3	3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	-	30 BUJK	200 orang	75 orang	38%					-
1	3	1	02. 04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi							95%	95%		Rp 870.687.000
1	3	1	02.0 4	7	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100 Badan Usaha						100 Badan Usaha			Rp 870.687.000

1	3	1 2		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%	Rp 1.596.253.128
1	3	1 2	02. 01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen tata ruang yang ditetapkan	100%	1 dokume n	4 dokume n	2 dokume n	50%	1 dokume n	4 dokumen		Rp 800.000.000
1	3	1 2	02.0 1	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokume n	4 dokume n	2 dokume n	50%			
1	3	1 2	02.0 1	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		1 dokume n	3 dokume m	1 dokume n	33%			
1	3	1 2	02.0 1	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen					1 dokume n		Rp 800.000.000

1	3	1 2	02.0 1	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 dokumen	-	2 dokumen	-	-				
1	3	1 2	02.0 1	5	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota									
1	3	1 2	02.0 1	1 2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 dokumen								
1	3	1 2	02. 03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pemanfaatan Ruang	100%	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	1 dokumen	6 dokumen		Rp 396.480.000
1	3	1 2	02.0 3	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		100%	4 dokumen	4 dokumen	100%				
1	3	1 2	02.0 3	3	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 dokumen					1 dokumen			Rp 396.480.000

1	3	1 2	02. 04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kot a	Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100%	1 dokume n	4 dokume n	2 dokume n	50%	1 dokume n	4 dokumen		Rp 399.773.128
1	3	1 2	02.0 4	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		1 dokume n	4 dokume n	2 dokume n	50%				
1	3	1 2	02.0 4	8	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	120 dokumen					120 dokume n			Rp 399.773.128

KETERANGAN :

	Program
	Kegiatan
	Sub Kegiatan
	Sub Kegiatan tidak dianggarkan di Tahun 2024
	Sub Kegiatan baru dianggarkan dimulai pada P-APBD 2024

Berdasarkan tabel capaian kinerja renstra diatas terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan situasi serta kondisi yang mempengaruhi pencapaian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yaitu :

1. Tidak terdapat Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, semua target tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
2. Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi semua program, kegiatan, dan sub kegiatan tercapai sesuai target kinerja yang direncanakan.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian renstra perangkat daerah:
 - a. Program yang melebihi target
 - i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
 - a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - b) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - c) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - d) Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - ii. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - iii. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 - iv. Program Penataan Bangunan Gedung
 - v. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - vi. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab :
 - a. Tidak tercapainya/tidak memenuhi target kinerja
Semua target kinerja dapat tercapai dengan baik, hal ini dikarenakan adanya perencanaan kegiatan dan penganggaran yang tepat. Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar setiap permasalahan yang ada dapat diatasi guna terlaksananya kegiatan sesuai target yang direncanakan.

- b. Realisasi kinerja yang memenuhi atau melebihi target kinerja
Semua sasaran kinerja menghasilkan capaian kinerja yang melebihi dari target kinerja.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tugas Pokok

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

Indikator yang menjadi tolok ukur perangkat daerah yang tertuang dalam renstra perangkat daerah meliputi :

- 1. Indikator Tujuan Perangkat Daerah "Memantapkan Kualitas Infrastruktur Kota"

- a. Kinerja kualitas infrastruktur kota adalah kualitas jalan yang mantab, bangunan gedung pemerintah yang representatif, saluran lingkungan dan saluran drainase berfungsi dengan baik.
 - b. Rumus Perhitungan kinerja ini dibentuk dari rata-rata beberapa indikator antara lain; indikator presentase jalan dalam kondisi mantab, presentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak (limbah domestik dan sampah), persentase keluarga pengguna listrik serta kualitas sinyal telepon dan internet.
2. Indikator Sasaran Perangkat Daerah "Indeks Reformasi Birokrasi"
- a. Indeks Reformasi Birokrasi sendiri adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 132 komponen, mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi.
 - b. Rumus Perhitungan indeks reformasi birokrasi diperoleh dari hasil penilaian Tim Menpan RB.
3. Indikator Sasaran Perangkat Daerah "Meningkatnya aksesibilitas kota yang merata"
- a. Kinerja aksesibilitas kota adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan/jembatan dari kondisi rusak ringan/ tanah menjadi kondisi mantab.
 - b. Rumus Perhitungan diperoleh dari rasio perbandingan panjang jalan kota kondisi mantab dengan total panjang jalan kota.
4. Indikator Sasaran Perangkat Daerah "Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan"
- a. Kinerja ini meliputi rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum, kawasan rawan banjir/genangan.
 - b. Rumus Perhitungan kinerja tersebut ; rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum adalah rasio rumah tangga yang memiliki akses air minum dengan rumah tangga seluruhnya, kawasan rawan banjir/genangan rasio perbandingan antara luas kota Madiun dikurangi luas kawasan rawan banjir dengan total luas kota Madiun.
5. Indikator Sasaran Perangkat Daerah "Meningkatnya kualitas pembangunan gedung pemerintah"

- a. Mewujudkan kualitas bangunan/ gedung pemerintah menjadi lebih representative dan menambah masa manfaat bangunan.
 - b. Rumus Perhitungannya rasio perbandingan dari jumlah bangunan gedung dalam kondisi baik dengan jumlah bangunan gedung.
6. Indikator Sasaran Perangkat Daerah "Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW"
- a. Kinerja ini merupakan pemberian rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai ketentuan dan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan tata ruang.
 - b. Rumus Perhitungannya adalah rasio luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW dibagi total luas wilayah.
7. Indikator Program Perangkat Daerah "Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah"
- a. Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah merupakan bentuk pertanggung jawaban Pemerintah kepada publik atas penggunaan keuangan negara.
 - b. Rumus Perhitungan Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Sakip.
8. Indikator SPM/LPPD yang di ampu "Kinerja Penyediaan kebutuhan pokok air minum"
- a. Sebagai pengampu SPM "Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari" Dinas Pekerjaan Umum setiap triwulan menerima laporan realisasi dari instansi pelaksana yaitu, PDAM.
 - b. Rumus perhitungan dari rasio rumah tangga yang terlayani dengan Total rumah tangga di Kota Madiun.
9. Indikator SPM/LPPD yang di ampu "Kinerja Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik"
- a. Sebagai pengampu SPM "Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik". Dinas Pekerjaan Umum setiap triwulan menerima laporan realisasi dari instansi pelaksana yaitu, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
 - b. Rumus perhitungan dari rasio Persentase Rumah tangga bersanitasi dengan Total rumah tangga di Kota Madiun.

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

No	Uraian Indikator	Indikator					Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kinerja kualitas infrastruktur kota		√				95%	95.50%	96%	96.5%	100.03%	100%	100%	100%	Tercapai
2	Indeks Reformasi Birokrasi			√			20.31%	22.31%	24.31%	26.31%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
3	kinerja aksesibilitas kota yang merata			√			95%	95.5%	96%	96.5%	100.03%	100%	100%	100%	Tercapai
4	kinerja kualitas sanitasi lingkungan														
	Presentase kawasan rawan banjir/genangan			√			19.09%	18.47%	17.34%	16.21%	104.35%	100%	100%	100%	Tercapai
	Presentase kawasan bebas banjir/genangan			√			80.89%	81.58%	82.82%	83.79%	101.05%	100%	100%	100%	Tercapai
	Presentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

No	Uraian Indikator	Indikator					Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Presentase terbangunnya saluran limbah domestik			-			-	-	-	-	-	-	-	-	
5	kinerja kualitas pembangunan gedung pemerintah			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
6	kinerja pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
7	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah				√		Score A	Score A	Score A	Score A	Score A	Score A	Score A	Score A	Tercapai
8	Kinerja Penyediaan kebutuhan pokok air minum	√				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
9	Kinerja Penyediaan Pelayanan	√				√	100%	99.72 %	99.81 %	100%	99.72%	100%	100%	100%	Tercapai

No	Uraian Indikator	Indikator					Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengolahan Air Limbah Domestik														

Dilihat berdasarkan tabel capaian kinerja pelayanan di atas terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan situasi serta kondisi yang mempengaruhi pencapaian Perangkat Daerah yaitu :

Tabel 3 Faktor Penghambat dan Pendorong Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

No	Uraian Indikator	Indikator					Faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi	Faktor Pendorong atau Kebijakan yang diambil
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)
1	Kinerja kualitas infrastruktur kota		√				Kurangnya Tenaga Teknis di bidang Infrastruktur dan terbatasnya anggaran dalam penyelesaian fisik	Adanya peran masyarakat yang berpikir secara kritis dalam menilai pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan Dinas PUPR
2	Indeks Reformasi Birokrasi			√			Kurangnya kualitas SDM, pola pikir, kinerja organisasi dan strategi pelayanan dalam memberikan pelayanan publik	Adanya peran masyarakat yang berpikir secara kritis dalam menilai pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan Dinas PUPR

No	Uraian Indikator	Indikator					Faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi	Faktor Pendorong atau Kebijakan yang diambil
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)
3	Kinerja aksesibilitas kota yang merata			√			Kurangnya Tenaga Teknis di bidang Infrastruktur dan terbatasnya anggaran dalam penyelesaian fisik	Adanya peran masyarakat yang berpikir secara kritis dalam menilai pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan Dinas PUPR
4	Kinerja kualitas sanitasi lingkungan			√			Masih adanya lokasi saluran yang memerlukan pembenahan tetapi adanya keterbatasan anggaran	Peran serta penyedia dalam melaksanakan pembenahan
5	Kinerja kualitas pembangunan gedung pemerintah			√			Kurangnya Tenaga Teknis di bidang Infrastruktur dan terbatasnya anggaran dalam penyelesaian fisik	Adanya peran masyarakat yang berpikir secara kritis dalam menilai pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan Dinas PUPR
6	Kinerja pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW			√			Adanya peraturan baru yang harus diperhatikan terkait tata ruang dan lahan sawah yang dilindungi	Peran serta masyarakat dalam mentaati RTRW
7	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah				√		Adanya perubahan jadwal pelaksanaan terkait SAKIP yang tidak sesuai dengan rencana	Peran kinerja SDM Dinas PUPR yang optimal
8	Kinerja Penyediaan kebutuhan pokok air minum	√				√	Dinas PUPR hanya sebagai pengampu laporan SPM di bidang pekerjaan umum yang memperoleh data-data dari Dinas Perkim dan PDAM sebagai pelaksana SPM sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam kecukupan data	Adanya kemudahan dalam berkoordinasi dengan OPD terkait pelaksana SPM
9	Kinerja Penyediaan Pelayanan	√				√	Dinas PUPR hanya sebagai pengampu laporan SPM di bidang pekerjaan umum yang memperoleh	Adanya kemudahan dalam berkoordinasi dengan OPD terkait pelaksana SPM

No	Uraian Indikator	Indikator					Faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi	Faktor Pendorong atau Kebijakan yang diambil
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)
	Pengolahan Air Limbah Domestik						data-data dari Dinas Perkim dan PDAM sebagai pelaksana SPM sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam kecukupan data	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2021 mendapatkan nilai indeks 86.50 dengan kategori Baik dengan unsur nilai 3 (tiga) terendah berada pada unsur :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana
2. Kemudahan pengaduan konsultasi dan informasi tatap muka langsung
3. Keadilan mendapatkan pelayanan

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu :

Tabel 4 Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

No	Permasalahan	Hambatan
1	Masih rendahnya kompetensi dan kualitas penyedia jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum	Kurangnya kesadaran bagi penyedia dalam melaksanakan pembangunan atas pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan

Dampak Permasalahan dan hambatan dalam pencapaian :

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah

“Terwujudnya pemerintahan bersih berwibawa menuju masyarakat sejahtera”.

Misi Kepala Daerah :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
2. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Misi Perangkat Daerah :

“Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan”

2. Terhadap Capaian Program Nasional (SPM, SDGs)

Tantangan dan Peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat daerah :

Tabel 5 Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

No	Tantangan	Peluang
1	Pemberian sosialisasi terhadap masyarakat Kota Madiun tentang penertiban pemanfaatan ruang	Adanya kesadaran dan partisipasi bagi masyarakat Kota Madiun untuk mendukung program pemerintah

Isu Penting serta rekomendasi dan catatan yang strategis dalam menentukan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas :

1. Isu Penting

- a. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana penataan ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif ;
- b. Belum adanya dokumen perencanaan teknis sebagai pedoman pemberian perijinan pemanfaatan ruang yang melibatkan masyarakat pada seluruh kawasan prioritas;
- c. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari aturan yang seharusnya ditegakkan sebagai akibat dari lemahnya dalam pengendalian bangunan;
- d. Belum optimalnya penyediaan jaringan drainase/ saluran untuk mengatasi masalah genangan/banjir di kawasan rawan genangan/ banjir di Kota Madiun;
- e. Belum optimalnya kondisi jalan dan jembatan perkotaan yang memberikan kenyamanan masyarakat;
- f. Belum optimalnya kondisi bangunan gedung pemerintah Kota Madiun.

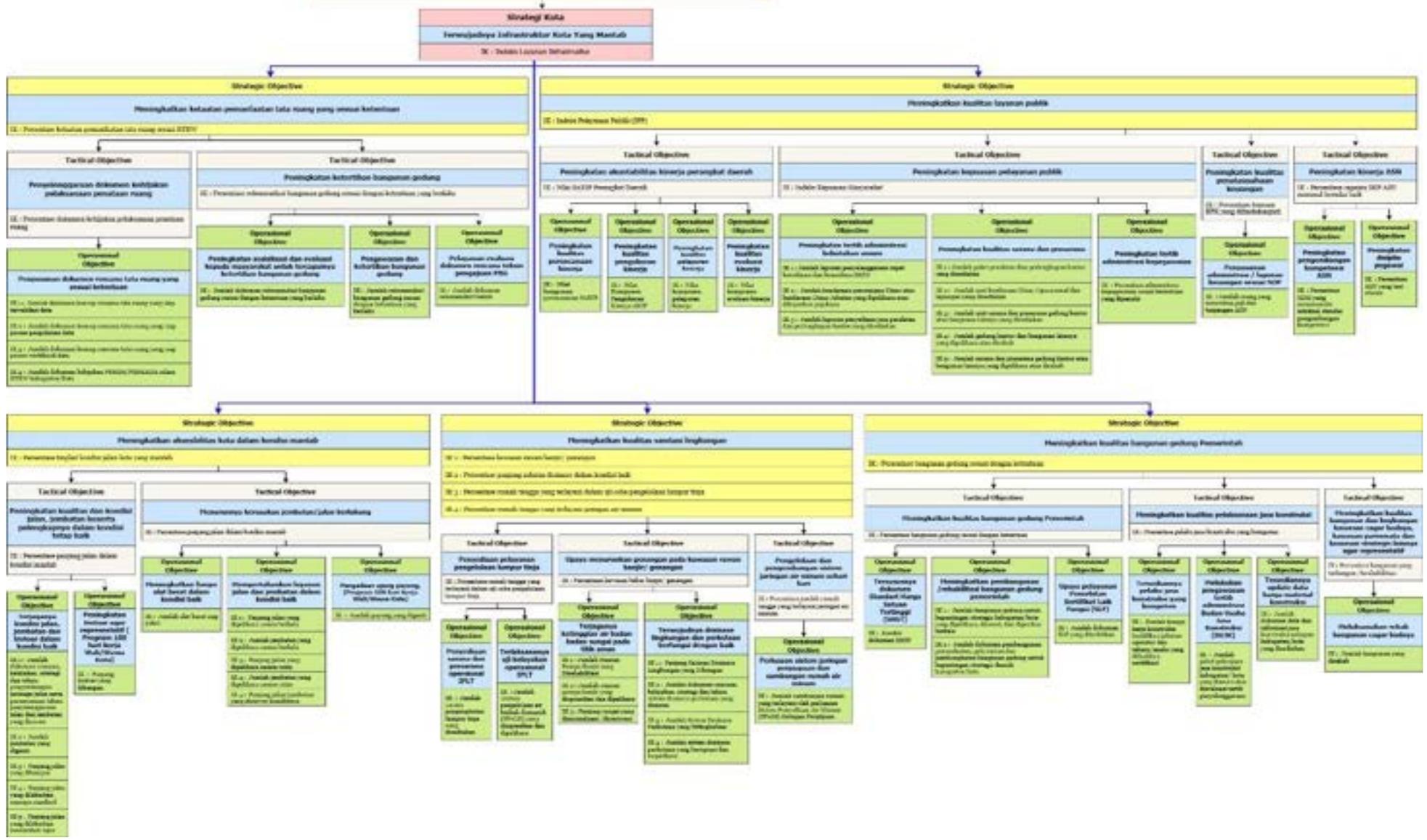
2. Rekomendasi Catatan

- a. Perlu dilakukan peningkatan/ pemeliharaan kondisi bangunan/ gedung agar lebih representative dan untuk menambah masa manfaat;
- b. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pelayanan perangkat daerah;
- c. Perlu dilakukan peningkatan kualitas dan fungsi jaringan drainase/ saluran dikawasan perkotaan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diambil dari Renstra Perangkat daerah pada Tahun Berkenaan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisa kebutuhan didasarkan pada evaluasi kinerja Perangkat Daerah, analisa kinerja pelayanan dan identifikasi isu – isu penting yang telah dibagikan dalam bentuk Pohon Kinerja Perangkat Daerah.

Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan



Gambar 1 Pohon Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

Tabel 6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Madiun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Madiun	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Score A	13,128,150,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Madiun	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Score A	14,434,000,000	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	100,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	110,000,000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Madiun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	100,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Madiun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	110,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	7,000,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	7,700,000,000	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Madiun	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	7,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Madiun	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	7,700,000,000	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	300,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	330,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	300,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	330,000,000	
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Madiun	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah	100%	664,550,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Madiun	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah	100%	775,000,000	
9	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Madiun	Jumlah unit kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	552,050,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Madiun	Jumlah unit kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	650.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 Unit	112,500,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 Unit	125.000.000	
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Madiun	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah	100%	4,210,800,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Madiun	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah	100%	4,600,000,000	
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Madiun	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Laporan	4,210,800,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Madiun	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang	10 Laporan	4.600.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								disediakan			
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Madiun	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	100%	852,800,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Madiun	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	100%	919,000,000	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Madiun	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	59 Unit	380,900,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Madiun	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	59 Unit	400,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	471,900,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	519,000,000	
16	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Madiun	Persentase Kawasan Rawan Banjir/ Genangan	17.34%	13,464,112,400	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Madiun	Persentase Kawasan Rawan Banjir/ Genangan	17.34%	14,151,000,000	
17	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Persentase Kawasan Rawan Banjir/ Genangan	17.34%	13,464,112,400	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Persentase Kawasan Rawan Banjir/ Genangan	17.34%	14,151,000,000	
18	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Madiun	Jumlah pintu air atau bendung pengendali banjir yang dibangun	2 Unit	0	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Madiun	Jumlah pintu air atau bendung pengendali banjir yang dibangun	2 Unit	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhabilitasi	1 Unit	235,100,000	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhabilitasi	1 Unit	250,000,000	
20	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah stasiun pompa banjir yang ditingkatkan	1 Unit	3,125,800,000	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah stasiun pompa banjir yang ditingkatkan	1 Unit	3,500,000,000	
21	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kota Madiun	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.5 km	9,022,332,400	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kota Madiun	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.5 km	9,200,000,000	
22	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1,080,880,000	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1,200,000,000	
23	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Madiun	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100%	123,019,490	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Madiun	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan	100%	125,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								an air minum			
24	Pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/ Kota	Kota Madiun	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100%	123,019,490	Pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/ Kota	Kota Madiun	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100%	125,000,000	
25	Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis SPAM	Kota Madiun	Jumlah rencana kebijakan strategi dan teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	123,019,490	Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis SPAM	Kota Madiun	Jumlah rencana kebijakan strategi dan teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	125,000,000	
26	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Madiun	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80,12%	3,399,879,400	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Madiun	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80,12%	3,950,000,000	
27	Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam	Kota Madiun	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80,12%	3,399,879,400	Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam	Kota Madiun	Persentase panjang drainase dalam	80,12%	3,950,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	daerah Kabupaten/ Kota					daerah Kabupaten/ Kota		kondisi baik			
28	Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis system drainase perkotaan	Kota Madiun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	8 dokumen	934,750,000	Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis system drainase perkotaan	Kota Madiun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	8 dokumen	1,200,000,000	
29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Madiun	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	100 m	16,210,400,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Madiun	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	100 m	16,250,000,000	
30	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Madiun	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 m	2,254,729,400	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Madiun	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 m	2,500,000,000	
31	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kota Madiun	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	20,055,958,000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kota Madiun	Persentase bangunan gedung sesuai	100%	21,260,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								ketentuan			
32	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Madiun	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	20,055,958,000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Madiun	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	21,260,000,000	
33	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Madiun	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	50 Dokumen	242,900,000	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Madiun	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan	50 Dokumen	260,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Gedung, serta Implementasi SIMBG			
34	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	19,813,058,000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	21,000,000,000	
35	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kota Madiun	Persentase panjang saluran dalam kondisi baik	80.12%	21,846,810,878	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kota Madiun	Persentase panjang saluran dalam kondisi baik	80.12%	22,600,000,000	
36	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Persentase panjang saluran dalam kondisi baik	80.12%	21,846,810,878	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Persentase panjang saluran dalam kondisi baik	80.12%	22,600,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Madiun	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	27 Kawasan	21,253,876,878	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Madiun	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	27 Kawasan	22,000,000,000	
38	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Madiun	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Sistem Perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	27 Kawasan	592,934,000	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Madiun	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar budaya dan Tradisional	27 Kawasan	600,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Bersejarah, Kawasan Sistem Perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya			
39	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Madiun	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	96%	69,379,016,832	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Madiun	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	96%	73,520,000,000	
40	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	96%	69,379,016,832	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	96%	73,520,000,000	
41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Madiun	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan atvis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian	20 Dokumen	270,566,832	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Madiun	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan atvis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis,	20 Dokumen	280,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian			
42	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kota Madiun	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	500 m2	12,834,700,000	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kota Madiun	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	500 m2	15,000,000,000	
43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Madiun	Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan atau jembatan	2 Dokumen	408,600,000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Madiun	Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan atau jembatan	2 Dokumen	410,000,000	
44	Pembangunan Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang dibangun	2 km	654,850,000	Pembangunan Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang dibangun	2 km	700,000,000	
45	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kota Madiun	Panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standart	2 km		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kota Madiun	Panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standart	2 km	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	2 km	872,000,000	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	2 km	900,000,000	
47	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	12 km	18,511,100,000	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	12 km	20,000,000,000	
48	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	17 km	3,815,700,000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	17 km	4,000,000,000	
49	Pembangunan Jembatan	Kota Madiun	Panjang Jembatan yang Dibangun	28 m	31,784,750,000	Pembangunan Jembatan	Kota Madiun	Panjang Jembatan yang Dibangun	28 m	32,000,000,000	
50	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Madiun	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	120 m	226,750,000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Madiun	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	120 m	230,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kota Madiun	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	94.95%	453,469,000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kota Madiun	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	94.95%	460,000,000	
52	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Madiun	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	94.95%	207,669,000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Madiun	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	94.95%	210,000,000	
53	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Madiun	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	200 Orang	207,669,000	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Madiun	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	200 Orang	210,000,000	
54	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Kota Madiun	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	94.95%	245,800,000	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Kota Madiun	Persentase pelaku jasa konstruksi yang	94.95%	250,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								memenuhi standar kompetensi			
55	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Kota Madiun	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	50 Orang	245,800,000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Kota Madiun	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	50 Orang	250,000,000	
56	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kota Madiun	Prosentase Ketaatan terhadap RTRW	100%	2,150,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kota Madiun	Prosentase Ketaatan terhadap RTRW	100%	2,450,000,000	
57	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Prosentase Ketaatan terhadap RTRW	100%	1,350,000,000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Prosentase Ketaatan terhadap RTRW	100%	1,550,000,000	
58	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi	1 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			
59	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,000,000,000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,100,000,000	
60	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150,000,000	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000	
61	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	200,000,000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang	1 Dokumen	250,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Penataan ruang			
62	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Presentase Ketaatan tethadap RTRW	100%	400,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Presentase Ketaatan tethadap RTRW	100%	450,000,000	
63	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	400,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	450,000,000	
64	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Presentase Ketaatan tethadap RTRW	100%	400,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Presentase Ketaatan tethadap RTRW	100%	450,000,000	
65	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	400,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan	1 Dokumen	450,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								n Hukum Bidang Penataan Ruang			

Berdasarkan tabel hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah tidak ada perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam upaya untuk mengakomodir usulan masyarakat maka diperlukan sumber pendanaan selain APBD Kota Madiun, yaitu APBD Provinsi maupun APBN. Usulan-usulan masyarakat yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi dan atau APBN harus disertai data dukung dan telah di verifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.

Tabel 7 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Madiun

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Perkiraan Kebutuhan Anggaran	Usulan Sumber Pendanaan (APBD Prov / BK Prov/ APBN / DAK / DBHCHT / Lainnya (sebutkan))	Penjelasan dikaitkan dengan isu penyelenggaraan sesuai Tupoksi / Isu Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pembangunan IPLT	Kapasitas IPLT terbangun	Kelurahan Winongo	20 m3/hari	15 M	APBN/DAK/APBD	Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pengolahan dan pembuangan limbah yang ramah lingkungan
2.	Pembangunan Jembatan Patihan	Panjang Jembatan yang dibangun	Kelurahan Patihan	120x 8 m	80 M	APBN/DAK/APBD	Perlu adanya pembangunan jembatan baru yang menghubungkan antar kelurahan Manguharjo sehingga dapat mempermudah akses masyarakat

3.	Pembebasan lahan ring road timur	Luas lahan yang tersedia dalam penyelenggaraan jalan	Sepanjang Jalan Ring Road Timur	16.2 ha	220 M	APBD/APBN	Belum ada keputusan bahwa tanah yang terkena dampak pembangunan kedepannya akan menjadi obyek jalan ring road timur atau tidak
----	----------------------------------	--	---------------------------------	---------	-------	-----------	--

Catatan : tabel untuk usulan APBD Provinsi maupun APBN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Madiun yang secara langsung maupun tidak langsung tersangkut dan mendukung arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional meliputi :

“Prioritas Nasional 5, yaitu Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar”.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata. Adapun arah kebijakan pembangunan kewilayahan, yaitu pengembangan kawasan strategis (Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Destinasi Pariwisata Prioritas), pengembangan kawasan perkotaan dan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan, dan transmigrasi.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Hal tersebut dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur perkotaan.

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 8 Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
Memantapkan Kualitas Infrastruktur Kota Madiun	Indeks Infrastruktur	96%

Tabel 9 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	24.31	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A score
2	Meningkatnya aksesibilitas kota yang merata	Persentase tingkat kondisijalan kota yang mantap	96%	Program penyelenggaraan jalan	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	96%
3	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100%	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100%
		Persentase kawasan rawan banjir/genangan	17.34%	Program Pengelolaan SDA	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	17.34%
4	Meningkatnya kualitas pembangunan gedung pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%	1. Program penataan bangunan gedung 2. Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%
5	Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100%	Program penyelenggaraan tata ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100%

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel 8 dan tabel 9 dapat dilihat bahwa tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun yaitu "Memantapkan Kualitas Infrastruktur Kota Madiun" dengan indikator kinerja pada tahun 2024 yaitu Indeks Infrastruktur dengan target 96%. Kualitas infrastruktur kota adalah kualitas jalan yang mantab, bangunan gedung pemerintah yang representatif, saluran lingkungan dan saluran drainase berfungsi dengan baik. Sedangkan kinerja yang dibentuk dari rata-rata beberapa indicator antara lain; indikator presentase jalan dalam kondisi mantab, presentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak (limbah domestic dan sampah), persentase keluarga pengguna listrik serta kualitas sinyal telepon dan internet.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun memiliki 5 sasaran antara lain; meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan indicator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 132 komponen, mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi. Rumus Perhitungan indeks reformasi birokrasi diperoleh dari hasil penilaian Tim Menpan RB. Meningkatnya aksesibilitas kota yang merata dengan indikator persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab dengan target 96%, meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan dengan 3 indikator pendukung antara lain; Presentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum dengan target 100%, presentase kawasan rawan banjir/genangan dengan target 17.34%, meningkatnya kualitas pembangunan gedung Pemerintah dengan target 100%, meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW dengan target 100%.

3.3. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang ada di Daerah, sehingga perlu merumuskan apakah Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan mendukung pencapaian diantaranya :

Tabel 10 Program dan Kegiatan Mendukung Pencapaian Target Kota Madiun

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Visi Misi	SDG's	SPM	Kemiskinan	Faktor Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√				
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√				
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√				
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	4. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√				
	5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√				
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	6. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√				
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√				
	8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√				
B.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
7.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Visi Misi	SDG's	SPM	Kemiskinan	Faktor Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	9. Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	√	√			
	10. Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	√	√			
	11. Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	√	√			
	12. Normalisasi/Restorasi Sungai	√	√			
	13. Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	√	√			
B.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
8.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					
	14. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		√	√	√	√
C.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
9.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	15. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	√	√			
	16. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	√	√			
	17. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	√	√			
D.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
10.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
	18. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	√	√			
	19. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	√	√			

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Visi Misi	SDG's	SPM	Kemiskinan	Faktor Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
E.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
11.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					
	20. Penataan Bangunan dan Lingkungan	√	√	√		
	21. Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	√	√			
F.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
12.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					
	22. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	√	√			
	23. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	√	√			
	24. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	√	√			
	25. Pembangunan Jalan	√	√			
	26. Pelebaran Jalan Menuju Standar	√	√			
	27. Pelebaran Jalan Menambah Lajur	√	√			
	28. Pemeliharaan Berkala Jalan	√	√			
	29. Pemeliharaan Rutin Jalan	√	√			
	30. Pembangunan Jembatan	√	√			
	31. Pemeliharaan Rutin Jembatan	√	√			
G.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
13.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					
	32. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	√	√			
14.	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)					
	33. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	√	√			
H.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
15.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci					

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Visi Misi	SDG's	SPM	Kemiskinan	Faktor Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					
	34. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	√	√			
	35. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	√	√			
	36. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	√	√			
	37. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	√	√			
16.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					
	38. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	√	√			
17.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					
	39. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	√	√			

Catatan : di bawah tabel berikan narasi penjelasan faktor lain

Dari hasil identifikasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diampu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun, maka pada Tahun 2024 usulan yang diajukan dalam Renja Perangkat Daerah :

1. Jumlah Usulan :

- a. Program : 9 Program
- b. Kegiatan : 17 Kegiatan
- c. Sub Kegiatan : 34 Sub Kegiatan
- d. Pagu Anggaran : Rp. 133.956.663.404,00
- e. Sumber Pendanaan :
 - i. APBD : Rp. 133.956.663.404,00
 - ii. APBD PROV : Rp. -
 - iii. APBN : Rp. -
 - iv. Lainnya/DAK : Rp. 1.679.768.000,00
- f. Lokasi Kegiatan : Kota Madiun

Tabel 11 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Serta Prakiraan Maju Tahun 2025

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

No	Tahun Anggaran 2024					Tahun Anggaran 2025					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Madiun	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Score A	13,128,150,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Madiun	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Score A	14,434,000,000	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	100,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	110,000,000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Madiun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	100,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Madiun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	110,000,000	
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	7,000,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	7,700,000,000	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Madiun	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji	100%	7,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Madiun	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji	100%	7,700,000,000	

No	Tahun Anggaran 2024					Tahun Anggaran 2025					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ASN perangkat daerah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					ASN perangkat daerah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	300,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	330,000,000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	300,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	330,000,000	
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Madiun	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah	100%	664,550,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Madiun	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah	100%	775,000,000	
9	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Madiun	Jumlah unit kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	552,050,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Madiun	Jumlah unit kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	650.000.000	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kota Madiun	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau	10 Unit	112,500,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	10 Unit	125.000.000	

No	Tahun Anggaran 2024					Tahun Anggaran 2025					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	atau Bangunan Lainnya		bangunan lainnya yang disediakan					lainnya yang disediakan			
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Madiun	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah	100%	4,210,800,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Madiun	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah	100%	4,600,000,000	
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Madiun	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Laporan	4,210,800,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Madiun	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Laporan	4.600.000.000	
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Madiun	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	100%	852,800,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Madiun	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	100%	919,000,000	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kota Madiun	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	59 Unit	380,900,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Madiun	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	59 Unit	400,000,000	

No	Tahun Anggaran 2024					Tahun Anggaran 2025					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kendaraan Dinas Jabatan										
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	471,900,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	519,000,000	
16	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Madiun	Persentase Kawasan Rawan Banjir/ Genangan	17.34%	13,464,112,400	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Madiun	Persentase Kawasan Rawan Banjir/ Genangan	17.34%	14,151,000,000	
17	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Madiun	Persentase Kawasan Rawan Banjir/ Genangan	17.34%	13,464,112,400	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Madiun	Persentase Kawasan Rawan Banjir/ Genangan	17.34%	14,151,000,000	
18	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Madiun	Jumlah pintu air atau bendung pengendali banjir yang dibangun	2 Unit	0	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Madiun	Jumlah pintu air atau bendung pengendali banjir yang dibangun	2 Unit	0	
19	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhabilitasi	1 Unit	235,100,000	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah stasiun pompa banjir	1 Unit	250,000,000	

No	Tahun Anggaran 2024					Tahun Anggaran 2025					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								yang direhabilitasi			
20	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah stasiun pompa banjir yang ditingkatkan	1 Unit	3,125,800,000	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah stasiun pompa banjir yang ditingkatkan	1 Unit	3,500,000,000	
21	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kota Madiun	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.5 km	9,022,332,400	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kota Madiun	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.5 km	9,200,000,000	
22	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1,080,880,000	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1,200,000,000	
23	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Madiun	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100%	123,019,490	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Madiun	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100%	125,000,000	
24	Pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/ Kota	Kota Madiun	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100%	123,019,490	Pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/ Kota	Kota Madiun	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100%	125,000,000	

No	Tahun Anggaran 2024					Tahun Anggaran 2025					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis SPAM	Kota Madiun	Jumlah rencana kebijakan strategi dan teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	123,019,490	Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis SPAM	Kota Madiun	Jumlah rencana kebijakan strategi dan teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	125,000,000	
26	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Madiun	Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	1.742.925.500	
27	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Prosentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam Pelayanan Limbah Domestik	100%	1.742.925.500	
28	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	-	-	-	-	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kota Madiun	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Yang Disediakan	1 Unit	1.415.100.000	
29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air	-	-	-	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Madiun	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	5 Unit	327.825.500	

No	Tahun Anggaran 2024					Tahun Anggaran 2025					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Limbah Domestik (SPALD)							(SPALD) Yang Dioperasikan dan Dipelihara			
30	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Madiun	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80,12%	3,399,879,400	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Madiun	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80,12%	3,950,000,000	
31	Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kota Madiun	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80,12%	3,399,879,400	Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kota Madiun	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80,12%	3,950,000,000	
32	Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis system drainase perkotaan	Kota Madiun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	8 dokumen	934,750,000	Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis system drainase perkotaan	Kota Madiun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	8 dokumen	1,200,000,000	
33	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Madiun	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	100 m	16,210,400,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Madiun	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	100 m	16,250,000,000	

No	Tahun Anggaran 2024					Tahun Anggaran 2025					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Madiun	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 m	2,254,729,400	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Madiun	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 m	2,500,000,000	
35	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kota Madiun	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	20,055,958,000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kota Madiun	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	21,260,000,000	
36	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Madiun	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	20,055,958,000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Madiun	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	21,260,000,000	
37	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan	Kota Madiun	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan	50 Dokumen	242,900,000	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Madiun	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli	50 Dokumen	260,000,000	

No	Tahun Anggaran 2024					Tahun Anggaran 2025					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG					(TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			
38	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	19,813,058,000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	21,000,000,000	
39	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA	Kota Madiun	Persentase panjang saluran dalam kondisi baik	80.12%	21,846,810,878	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kota Madiun	Persentase panjang saluran dalam kondisi baik	80.12%	22,600,000,000	
40	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Madiun	Persentase panjang saluran dalam kondisi baik	80.12%	21,846,810,878	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Madiun	Persentase panjang saluran dalam kondisi baik	80.12%	22,600,000,000	
41	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Madiun	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan	27 Kawasan	21,253,876,878	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Madiun	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar	27 Kawasan	22,000,000,000	

No	Tahun Anggaran 2024					Tahun Anggaran 2025					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			tradisional bersejarah, kawasan pariwisata kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya					budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya			
42	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Madiun	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Sistem Perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	27 Kawasan	592,934,000	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Madiun	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Sistem Perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	27 Kawasan	600,000,000	
43	PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	Kota Madiun	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	96%	69,379,016,832	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Madiun	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	96%	73,520,000,000	
44	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	96%	69,379,016,832	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	96%	73,520,000,000	

No	Tahun Anggaran 2024					Tahun Anggaran 2025					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Madiun	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan atvis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian	20 Dokumen	270,566,832	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Madiun	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan atvis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian	20 Dokumen	280,000,000	
46	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kota Madiun	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	500 m2	12,834,700,000	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kota Madiun	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	500 m2	15,000,000,000	
47	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Madiun	Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan atau jembatan	2 Dokumen	408,600,000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Madiun	Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan atau jembatan	2 Dokumen	410,000,000	
48	Pembangunan Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang dibangun	2 km	654,850,000	Pembangunan Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang dibangun	2 km	700,000,000	
49	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kota Madiun	Panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standart	2 km	0	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kota Madiun	Panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standart	2 km	0	
50	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	2 km	872,000,000	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	2 km	900,000,000	

No	Tahun Anggaran 2024					Tahun Anggaran 2025					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	12 km	18,511,100,000	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	12 km	20,000,000,000	
51	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	17 km	3,815,700,000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	17 km	4,000,000,000	
52	Pembangunan Jembatan	Kota Madiun	Panjang Jembatan yang Dibangun	28 m	31,784,750,000	Pembangunan Jembatan	Kota Madiun	Panjang Jembatan yang Dibangun	28 m	32,000,000,000	
53	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Madiun	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	120 m	226,750,000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Madiun	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	120 m	230,000,000	
54	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kota Madiun	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	94.95%	453,469,000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kota Madiun	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	94.95%	460,000,000	
55	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Madiun	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	94.95%	207,669,000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Madiun	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	94.95%	210,000,000	
56	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Madiun	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan	200 Orang	207,669,000	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Madiun	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan	200 Orang	210,000,000	

No	Tahun Anggaran 2024					Tahun Anggaran 2025					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan					Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan			
57	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Kota Madiun	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	94.95%	245,800,000	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Kota Madiun	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	94.95%	250,000,000	
58	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Kota Madiun	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	50 Orang	245,800,000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Kota Madiun	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	50 Orang	250,000,000	
59	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Kota Madiun	Prosentase Ketaatan terhadap RTRW	100%	2,150,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kota Madiun	Prosentase Ketaatan terhadap RTRW	100%	2,450,000,000	
60	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Prosentase Ketaatan terhadap RTRW	100%	1,350,000,000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Prosentase Ketaatan terhadap RTRW	100%	1,550,000,000	

No	Tahun Anggaran 2024					Tahun Anggaran 2025					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	
62	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,000,000,000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,100,000,000	
63	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150,000,000	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000	
64	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	200,000,000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	250,000,000	

No	Tahun Anggaran 2024					Tahun Anggaran 2025					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Presentase Ketaatan tethadap RTRW	100%	400,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Presentase Ketaatan tethadap RTRW	100%	450,000,000	
66	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	400,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	450,000,000	
67	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Presentase Ketaatan tethadap RTRW	100%	400,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Presentase Ketaatan tethadap RTRW	100%	450,000,000	
68	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	400,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	450,000,000	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Prioritas Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 yang harus didukung dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah :

1. Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City
2. Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun mempunyai prioritas pembangunan dalam mendukung Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang adalah melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan saluran drainase dan saluran lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah Kota Madiun serta pelayanan pemberian rekomendasi bangunan. Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki pagu anggaran Rp. 133.956.663.404. Seluruh anggaran berasal dari dana alokasi umum (DAU). Berikut ini besaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap program adalah sebagai berikut :

Tabel 12 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024

NO.	PROGRAM	PAGU ANGGARAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	14.157.991.732
2.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12.272.930.000
3.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.679.768.000
4.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	11.155.429.400
5.	Penataan Bangunan Gedung	22.076.333.314
6.	Penataan Bangunan Dan Lingkungan	24.585.636.000
7.	Penyelenggaraan Jalan	45.212.224.958
8.	Pengembangan Jasa Konstruksi	1.219.870.000
9.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.596.480.000

Tabel 13 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025							C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Hasil (Sasaran)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikati f (Rp.)	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikati f (Rp.)
							Cap aian Pro gram	Kel uar an Keg iata n	Kelu aran Sub Keg iatan	Hasil Kegi atan (Sas aran)				Tolak Ukur	Targ et	
0 1 0 2 0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							14.814. 889.953				18.400. 000.000			
1 0 2 0 1 2 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							294.251 .670				175.000 .000			
1 0 2 0 1 2 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implement asi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implement asi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Kota Madiun, Kartoharj o, Kartoharj o	85	85 %	8 doku men	85	140.868. 950	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	Dokumen Perencana an Perangkat Daerah yang tersusun	8 doku men	100.000. 000	

1	02	01	200016	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	81	100%	12 laporan	81	153.382.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	75.000.000
1	02	01	2002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										7.500.000.000		7.750.000.000		
1	02	01	200021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	81	100%	48 orang/bulan	81	7.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48 orang/bulan	7.750.000.000

1	02	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah										467.087.000		775.000.000			
1	02	01	20062	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor			81	100%	5 paket	81	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor	5 paket	300.000.000
1	02	01	20069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaporkan	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		81	100%	12 laporan	81	467.087.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	12 laporan	475.000.000
1	02	01	2007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										496.721.848		3.400.000.000			
			0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan			81	100%	2 unit	81	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 unit	2.750.000.000

1	02	01	200170	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	81	100%	2 unit	81	496.721.848	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2 unit	650.000.000
1	02	01	2008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										4.200.316.799		4.525.000.000		
1	02	01	200083	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	81	100%	12 laporan	81	4.200.316.799	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	4.525.000.000
1	02	01	2009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.856.512.636		1.775.000.000		
1	02	01	200091	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya dan terbayarnya pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	81	100%	54 unit	81	945.673.670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terpeliharanya dan terbayarnya pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	54 unit	825.000.000

1	03215	00815	200815	00815	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara			81,67%	81,67%	1 unit	81,67%	805.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 unit	1.225.000.000
1	03213	00913	200913	00913	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi			81,67%	81,67%	1 km	81,67%	6.094.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 km	7.025.000.000
1	03218	00918	200918	00918	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Peningkatan stasiun pompa banjir			81,67%	81,67%	1 unit	81,67%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan stasiun pompa banjir	1 unit	5.025.000.000
1	03215	00215	200215	00215	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Persentase kawasan bebas banjir/genangan										-				550.000.000
1	033	003			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM											598.476.100		275.000.000		
1	033	002			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota											598.476.100		275.000.000		

			0 1																	
1	0 3	0 3	2 0 0 3 1 2		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	Jumlah Rumah Tangga yang belum terlayani kebutuhan jaringan air minum	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rumah Tangga yang belum terlayani kebutuhan jaringan air minum			100 %	100 SR	100 SR	100%	598.476. 100	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m	Rumah Tangga yang belum terlayani kebutuhan jaringan air minum	100 SR	275.000. 000
0 1	0 3	0 5		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												1.742.9 25.500			1.125.0 00.000	
0 1	0 3	0 5	2 0 1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota												1.742.9 25.500				1.125.0 00.000
0 1	0 3	0 5	2 0 0 3 1 7	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan						1 unit		1.415.10 0.000				500.000. 000	
0 1	0 3	0 5	2 0 0 3 1 8	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Presentase rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik	Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan limbah domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Terpeliharanya Sistem Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT)			100 %	100 %	5 unit	100%	327.825. 500	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m	Terpelihara nya Sistem Instalasi Pengelolaa n Limbah Tinja (IPLT)	5 unit	625.000. 000	
0 1	0 3	0 6		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE												20.623. 990.200			28.125. 000.000	

013601	20	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota										20.623.990.200			28.125.000.000	
01360112	2001	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Terbangunnya saluran drainase lingkungan		18,33%	81,67%	2000 m	18,33%	7.632.870.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terbangunnya saluran drainase lingkungan	2000 m	12.025.000.000
01360114	2002	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Meningkatnya sistem drainase perkotaan		18,33%	81,67%	1 Sistem Drainase Perkotaan	18,33%	9.783.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sistem drainase perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	12.025.000.000
01360110	2003	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Tersusunnya dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan		18,33%	81,67%	12 dokumen	18,33%	949.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusunnya dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan	12 dokumen	975.000.000
01360111	2003	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi	Menurunnya kawasan rawan banjir/genangan		18,33%	81,67%	1 Sistem Drainase Perkotaan	18,33%	2.258.190.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya kawasan rawan banjir/genangan	1 Sistem Drainase Perkotaan	3.100.000.000

					Kabupaten/ Kota			Diperiksa Berkala											
0 1	0 3	0 8	2 0 0 1	0 2 1	Pembanguna n, Pemanfaatan , Pelestarian dan Pembongkara n Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/K ota	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	Persentase bangunan/ gedung yang terbangun/ terehabilita si	Jumlah Dokumen Pembanguna n, Pemanfaatan , Pelestarian dan Pembongkar an Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/K ota	Bangunan yang terbangun	100 %	100 %	2 doku men	100%	18.541.8 70.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	Bangunan yang terbangun	2 doku men	35.250.0 00.000	

013813	200213	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	Persentase bangunan/gedung yang terbangun/terehabiltasi	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan yang diterbitkan	100%	100%	10 dokumen	100%	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan yang diterbitkan	10 dokumen	275.000.000
0139		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA									1.829.302.000			1.327.400.000	
01391	200213	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota									1.829.302.000			1.327.400.000	

0	0	0	2	0	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persentase bangunan/gedung yang terbangun/terehab	Persentase bangunan/gedung yang terbangun/terehab	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Tertatanya Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		100%	100%	1 kawasan	100%	1.829.302.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tertatanya Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 kawasan	1.327.400.000
0	0	1			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										37.372.671.600		37.910.000.000		
0	0	1	2	0	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										37.372.671.600		37.910.000.000		
0	0	1	2	0	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Presentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang disusun	Panjang jalan yang terbangun		95,80%	95,80%	5 dokumen	5 dokumen	221.998.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Panjang jalan yang terbangun	5 dokumen	325.000.000

013020	Penggantian Jembatan	Presentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	Jumlah Jembatan yang Diganti	Penggantian jembatan		95,80%	95,80%	2 jembatan	2 jembatan	23.710.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penggantian jembatan	2 jembatan	3.000.000.000
013020	Pembangunan Jalan			Panjang Jalan yang dibangun					km		2.216.740.000				2.000.000.000
013020	Pemeliharaan Berkala Jalan	Presentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Terpeliharanya jalan secara berkala		95,80%	95,80%	8 km	8 km	23.288.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terpeliharanya jalan secara berkala	8 km	18.025.000.000
013020	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Presentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Panjang jalan yang dilebarkan		95,80%	95,80%	1 km	1 km	929.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Panjang jalan yang dilebarkan	1 km	1.525.000.000
013020	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Presentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Terpeliharanya jembatan secara rutin		95,80%	95,80%	25 jembatan	25 jembatan	221.430.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terpeliharanya jembatan secara rutin	25 jembatan	275.000.000

013011	001011	2041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Presentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	Panjang jalan yang ditambah lajurnya	95,80%	95,80%	1 km	1 km	4.175.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Panjang jalan yang ditambah lajurnya	1 km	6.025.000.000
013012	001012	2041	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Presentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Terpeliharanya jembatan secara berkala	95,80%	95,80%	2 jembatan	2 jembatan	243.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terpeliharanya jembatan secara berkala	2 jembatan	275.000.000
013013	001013	2041	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Presentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	lokasi jalan/jembatan yang tersurvey	95,80%	95,80%	485,435 km	3 kecamatan	408.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	lokasi jalan/jembatan yang tersurvey	3 kecamatan	435.000.000
013016	001016	2041	Pemeliharaan Rutin Jalan	Presentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang jalan yang rutin terpelihara	95,80%	95,80%	20 km	20 km	5.642.453.200	Dana Transfer Umum-Dana	Panjang jalan yang rutin terpelihara	20 km	6.025.000.000

013120044	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Persentase pelaku jasa konstruksi yang kompeten	Persentase badan usaha konstruksi yang diawasi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Berusaha Badan Usaha Jasa Konstruksi	100 %	100 %	100 paket pekerjaan	100 paket pekerjaan	808.976.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Berusaha Badan Usaha Jasa Konstruksi	100 paket pekerjaan	335.000.000
01312	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG									1.250.000.000			1.325.000.000	
01312101	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota									500.000.000			525.000.000	
01312103	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Presentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	Presentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	100 %	100 %	1 dokumen	100%	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	1 dokumen	525.000.000
01312103	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota									400.000.000			425.000.000	
01312103	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Presentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	Presentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	100 %	100 %	20 dokumen	100%	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	20 dokumen	425.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Pentaan Ruang Kota Madiun telah dilakukan pembahasan dan analisis kebutuhan dan memperhatikan isu-isu penting terkait pelayanan Perangkat Daerah. Forum Renja Perangkat Daerah juga mengakomodir usulan masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan bersama stakeholder terkait, usulan Pokok Pikiran DPRD, usulan Top Down, serta yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Berdasarkan kinerja tahun sebelumnya, arahan prioritas pembangunan dan Rencana Strategis maka tujuan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2025 adalah meningkatnya kualitas layanan perhubungan darat dengan sasaran meningkatnya kelancaran lalu lintas.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun disusun sebagai dokumen pendukung dan penyelarasan dokumen perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2025.

Madiun, 23 September 2024



THARIO MEGAH, S.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197710122006041009